

Oetoesan - Hindia:

Telaah Pemikiran Kebangsaan

Volume 2 No 2 Tahun 2020 Hlmn. 90-98

Artikel Masuk 12 November 2020 | Artikel Diterima 1 Desember 2020

Koperasi sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan Indonesia

Novrida Qudsi Lutfillah*

Universitas Wijaya Putra, Jl. Benowo 1-3 Surabaya Indonesia, 60191

*vridaoayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi Indonesia dan memaknainya secara subjektif, dan mengusulkan ekonomi kerakyatan ala Indonesia. Data hasil pertanian, kelautan, dan perkebunan yang didapat dari media digunakan untuk menggambarkan kondisi Indonesia. Data tersebut dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah, tetapi kondisi ini belum membuat Indonesia menjadi mandiri. Masih ditemui kasus yang menyebabkan Indonesia bergantung pada negara lain dan terbebani oleh utang luar negeri. Untuk menjadi mandiri, perlu diterapkan paradigma ekonomi kerakyatan versi Indonesia dengan membentuk koperasi.

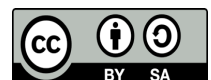
Kata Kunci: Koperasi; Kemandirian; Ekonomi.

Abstract

This research aims to provide a picture of the Indonesian condition and interpret it subjectively, then it will offer an Indonesian-style populist economy. Agricultural, marine and plantation product data obtained from the media is used to describe the condition of Indonesia, then the data is analyzed descriptively. The research results show that Indonesia's natural wealth is very abundant, but this condition has not made Indonesia independent. There are still cases that cause Indonesia to depend on other countries and burdened by foreign debt. To become independent, this paper offers an application of the Indonesian version of the populist economy paradigm by forming cooperation.

Keywords : Koperasi; Independence; Economy.

Masa keemasan Islam yang berlangsung mulai abad ketujuh hingga akhir abad ke tujuh belas membuktikan bahwa berbekal iman-tauhid serta ilmu pengetahuan dan teknologi, memposisikan umat Islam dapat menguasai 2/3 wilayah dunia dengan menebarkan kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian diseluruh dunia. Di masa keemasan tersebut terjadi banyak revolusi yang mengubah kehidupan, dimulai dari ditemukan angka arab, ilmu kedokteran, filsafat, fiqh, sejarah, matematika hingga



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



teknologi informasi berasal dari ilmuwan muslim. Penemuan penting lainnya adalah ditemukannya mesin penunjuk waktu, optik, dan teknologi mesin pompa untuk menggerakkan roda kereta api dan kendaraan sebagai cikal bakal revolusi industri di Inggris. Namun ketika Islam tidak lagi diamalkan secara *kaffah* sebagaimana dicontohkan Rasullulah SAW, Islam mengalami deklinasi.

Sementara itu, sejak Revolusi Industri mulai dari abad ke 18 hingga saat ini, seiring ledakan kemajuan teknologi membawa era globalisasi semakin digdaya. Hal ini dicirikan dengan memudarnya batas-batas negara secara politik-ekonomi dan sosial budaya, liberalisasi perdagangan, dan semakin tingginya persaingan. Semisal suatu bangsa memiliki kemampuan yang rendah di sektor ekonomi, maka akan menjadi pasar empuk bagi berbagai barang dan jasa hasil produksi bangsa lain yang lambat laun akan memengaruhi menurunnya sektor industri dan produksi dalam negeri. Kondisi ini yang dikehendaki oleh negara-negara kapitalis dan korporasi multinasional yang ingin menjadi arsitek peradaban, yaitu menjadikan suatu bangsa sebagai sasaran empuk dalam konsumsi barang dan jasa dari negaranya, sehingga dapat menghancurkan sektor industri dan jasa dalam negeri. Bagaimana dengan Bangsa Indonesia? Di sini saya akan memberikan beberapa potret, memaknai secara subyektif mengenai potret Indonesia dan menawarkan ekonomi kerakyatan ala Indonesia.

Metode

Penelitian kualitatif ini menggunakan data yang didapat dari media, yaitu data hasil panen beras, data import beras dan jagung, rumput laut, garam, dan kelapa sawit. Data tersebut dideskripsikan untuk memberikan potret kondisi Indonesia. selanjutnya data yang didapat dianalisis secara subjektif untuk diberikan penjelasan mengenai kondisi dibalik potret Indonesia. Refleksi dilakukan untuk menawarkan solusi yang sesuai dengan ekonomi kerakyatan ala Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Potret Indonesia. Indonesia adalah negara kaya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan ini adalah kekuatan tak terhingga untuk Indonesia menjadi mandiri. Kondisi alam tropis dan matahari yang selalu menyinari menjadikan tanah subur, merupakan potensi untuk menjadi lahan pertanian. Pantas oleh karenanya produktivitas beras di Indonesia berkategori baik. Mengikuti data Kementerian Pertanian, hasil gabah di Indonesia tahun 2016 mengalami peningkatan 11,7% jika dibanding tahun 2014 (Kementerian Pertanian, 2017). Keadaan berbalik ketika peningkatan hasil gabah yang gemilang ternyata membawa pada peningkatan harga beras diakhir 2017. Akibat kenaikan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang impor beras. Hal ini berlanjut hingga di awal 2018, dimana pemerintah menyetujui impor beras kualitas sedang dengan memperbarui aturan

Konstruksi untuk negeri...

Lutfillah, N.Q.

impor beras mengenai ekspor dan impor beras (Peraturan Menteri Perdagangan No 1 Tahun 2018). Langkah ini sebenarnya bertentangan dengan agenda dan prioritas negara¹ yang memiliki tekad untuk mandiri dengan tidak melakukan impor beras. Adanya kebijakan impor beras malah diklaim pemerintah tidak akan mengganggu kesejahteraan petani (Pramadiba, 2018).

Kekayaan tanah Indonesia, yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan sendiri, tapi yang terjadi adalah mengandalkan kekuatan impor, bukan hanya beras, jagungpun tak luput dalam skema impor. Data 2019 menyebutkan, pemerintah diawal tahun 2019 mengimpor 280.000 ton jagung. Alasan mengimpor jagung karena menteri pertanian memberikan data terkait panen jagung yang tidak sesuai faktan (Sukmana, 2019) sehingga pasokan jagung dalam negeri tidak sesuai dengan data. Alasan lain adalah untuk menjaga agar harga jagung tidak semakin tinggi di pasar (Mutia, 2019). Walau kaya namun impor tetap terjadi. Potret Indonesia saya arahkan ke sumber daya alam selain di darat yaitu laut. Fakta fisik tak terbantahkan adalah, 3/4 wilayah Indonesia (5,8 juta km²) berupa laut dengan 17.508 pulau yang dirangkai oleh garis pantai sepanjang 81.000 km (terpanjang di dunia setelah Kanada). Bentang jarak dari ujung barat (Sabang) ke ujung timur (Merauke) sebanding dengan jarak dari London hingga Baghdad (Burhanuddin dkk, 2003). Lebih dari itu, laut beserta kawasan pesisir yang mengitarinya mengandung potensi besar dan beranekaragam. Tak salah jika Indonesia disematkan sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang lengkap dengan berbagai keanekaragaman hayati.

Luasnya laut Indonesia, merupakan sumber daya potensial untuk swasembada garam bahkan bisa menjadi produsen garam terbesar di dunia. Realitas yang ada, periode 2010-2019, Indonesia masih menjadi importir garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena hasil produksi garam nasional 1,6 juta ton/tahun, sedangkan kebutuhan garam nasional 3,5 juta ton/tahun. Jika dinominalkan, Indonesia mengeluarkan uang senilai 90 juta dolar AS/ tahun untuk garam (Kelana, 2020). Selain garam, dengan panjangnya garis pantai, maka tersedia potensi lahan untuk rumput laut. Patut dibanggakan, Indonesia tercatat sebagai negara pengekspor bersih rumput laut² di dunia. Namun semua hanyalah kebanggaan semu, karena kondisi tersebut tidak sejalan dengan kondisi secara umum petani rumput laut yang belum sejahtera. Persoalannya adalah yang diekspor adalah rumput laut mentah bukan produk hilir (Cattleya, 2019). Dengan kata lain Indonesia tidak menjadi produsen produk berbahan baku rumput laut.

Bicara mengenai hulu dan hilir, ada sepenggal potret mengenai kelapa sawit.

¹Nawacita sebagai agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

²Hasil antara rumput laut di antaranya adalah agar, karaginan, alginat. Ketiganya mempunyai manfaat dalam industri pangan (es krim, roti, permen) dan non pangan (cat, farmasi, kosmetik) (Direktorat usaha dan investasi, 2013).

Tersedianya lahan kelapa sawit yang luas dan tersebar di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan kondisi iklim yang sangat potensial, membuat Indonesia mampu menjadi eksportir terbesar. Tetapi, Indonesia hanya mampu mengolah CPO menjadi produk turunan sebesar 60% dari total produksi dan mengekspor 40% minyak sawit dalam bentuk mentah. Sebaliknya, Malaysia telah mampu mengekspor produk turunan CPO sebesar 82,5% dan sisanya diekspor dalam bentuk mentah dan Malaysia mampu mengolah CPO menjadi 17 produk hilir yang bernilai tambah tinggi, seperti margarin, sabun, sampo (Warta Ekonomi, 2020).

Potret yang diambil dari sisi sumber daya alam Indonesia memberikan suatu paradoks. Dimana sebagai negara kaya dengan sumber daya alam melimpah dan seharusnya bisa mandiri, justru di sisi lain terbawa pada kondisi seolah menjadi negara miskin karena harus mengandalkan segalanya dari negara lain. Tata laksana perdagangan internasional terlihat jelas lebih menguntungkan negara maju ketimbang negara berkembang. Hasil pembangunan tidak bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, melainkan hanya oleh segelintir pemilik modal dan kaum boujuis. Jika dirunut lebih jauh, ada suatu kegagalan dalam sistem yang telah dianut pemerintah. Iya, saat nilai-nilai Pancasila sudah mulai ditanggalkan dan tanpa sadar terbawa pada sistem kapitalis, khususnya neoliberalisme. Suatu sistem yang menomorsatukan sektor finansial yang berbentuk maya, seperti bursa saham, valas, obligasi, surat hutang negara dan menomorduakan sektor riil. Kalau pun peduli pada sektor riil, biasanya terfokus pada sektor *non tradeable*, seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, hiburan, perumahan dan real estate, dan transportasi. Hingga saat ini akses petani dan nelayan terhadap aset ekonomi produktif masih sangat rendah. Sektor bank lebih senang mengucurkan kredit kepada sektor konsumtif ketimbang sektor riil.

Terlepas dari perangkap ketergantungan. Belum selesai dengan urusan ketidakmandirian dari segi sumber daya alam, data lain membeberkan kondisi Indonesia terhadap ketergantungan teknologi. Indonesia tercatat sebagai bangsa dengan tingkat konsumsi paling tinggi terutama untuk produk teknologi. Kenyataan industri dalam negeri menyebutkan Indonesia menggunakan 92% teknologi impor (Kementerian Perindustrian, 2009). Akibatnya produksi industri yang dibuat di Indonesia menjadi mahal karena teknologi serapan dan komponen produksi berasal dari impor. Sebagai contoh, elektronik dan otomotif, secara rata-rata, memuat beban bahan baku impor berkisar 60%—65% dari harga pokok penjualan (Winosa, 2018). Ketergantungan teknologi berasal dari impor terlihat juga pada mesin-mesin industri untuk pemrosesan produk pasca panen, yang menempati posisi pertama yaitu sebesar 17,12% (US\$ 27,197 Milyar) dari keseluruhan komoditas impor Indonesia (BPS, 2018). Dampaknya adalah kemampuan teknologi pascapanen yang dapat mengonversi produk-produk primer (bahan mentah) menjadi produk bernilai tambah masih rendah.

Selanjutnya, ketergantungan lainnya adalah di sistem ekonomi. Indonesia

Konstruksi untuk negeri...

Lutfillah, N.Q.

cenderung menanti modal asing yang datang (multinasional corporation), hutang luar negeri, investasi asing, serta cadangan devisa dari ekspor. Ketergantungan yang tinggi inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi tidak produktif dan berada pada perangkap lingkaran setan ketergantungan. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap teknologi asing membuat sistem industri menyerap banyak devisa untuk mengimpor teknologi. Karena cadangan devisa dari hasil ekspor kerap tidak memadai untuk mendanai impor teknologi, maka jalan terbaik adalah mencari pinjaman luar negeri. Kenyataan yang harus dihadapi adalah pinjaman luar negeri tidak memberikan pilihan lain dalam penggunaan teknologi terapan, kecuali mengimpor teknologi dari negara asal pinjaman dan ini sama saja 40% dana pinjaman tersebut kembali ke negara kreditor melalui jasa konsultan (sudah pasti tidak murah).

Bagaimanapun impor teknologi, ekonomi berbasis pasar ekspor dan bantuan dari negara lain tidak bisa dijadikan tumpuan. Untuk bisa keluar dari perangkap lingkaran ketergantungan memang dibutuhkan keberanian mengambil suatu terobosan dengan menjadi inovator dan penguasa teknologi. Tidak mudah, karena membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana, *research and desain* yang mumpuni, produsen, pengguna, regulator teknologi serta adanya dana. Selain itu, dibutuhkan juga sinergi dan *networking* antara pemerintah, pelaku industri, dan ilmuwan. Terkait dengan dana yang terbatas, bisa dimulai dengan menitikberatkan pada jenis teknologi yang menunjang sektor ekonomi rakyat dan industri unggulan seperti sumber daya alam. Adapun tujuannya adalah mengembangkan teknologi secara mandiri dan mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, untuk melepaskan diri (minimal mengurangi) dari ketergantungan terhadap teknologi impor. Tujuan selanjutnya Indonesia menjadi negara yang bukan saja menghasilkan produk hulu, tetapi juga produk hilir karena kekayaan sumber daya alam Indonesia melimpah dan belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Membumikan Ekonomi Kerakyatan ala Indonesia. Cengkraman neoliberalisme semakin kuat, dimana telah terjadi kondisi mengharamkan intrvensi pemerintah terhadap mekanisme pasar dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa kepada rakyat. Cengkraman lain dengan memaksakan diberlakukannya privatisasi serta liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan. Tak heran bila neoliberalisme dipraktikkan dinegara yang kesenjanganannya jelas ketara antara yang mampu dan tidak mampu, maka akan berimbas menjadi ketimpangan sosial ekonomi, seperti pengangguran dan kemiskinan yang makin bertambah. Pada tataran global, kesenjangan yang besar antara negara maju dan negara berkembang, maka sejatinya penerapan neoliberalisme sama dengan neokolonialisme.

Kini saatnya harus meninggalkan neoliberalisme dengan menerapkan paradigma ekonomi kerakyatan versi Indonesia, yaitu bangsa yang kuat dan mandiri sebagaimana termaktub di pasal 33 UUD 1945. Belajar dari gerakan yang dilakukan

HOS Tjokroaminoto untuk menjadikan Indonesia berdaya dan bermartabat, tahun 1913 Sarekat Islam (SI) membentuk badan usaha yaitu koperasi³ (Mulawarman, 2016). Koperasi yang didirikan merupakan suatu gerakan sosial ekonomi untuk menumbuhkan kesadaran kemandirian berekonomi dan persaingan yang tidak sehat dengan berbasis nilai Islam, sehingga model dan mekanisme yang dirancang berdasarkan pada hukum Islam dirancang. Selanjutnya periode 1950-an yang merupakan tahun-tahun awal ketika pucuk-pucuk pimpinan kekuasaan berupaya mewujudkan makna kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 1945. Periode yang dapat dikatakan sebagai masa kritis karena adanya berbagai kondisi darurat yang dilingkupi oleh keterbatasan infrastruktur, minimnya anggaran pemerintah dan nihilnya pengalaman sebagai bangsa yang bernegara. Salah satu organisasi masyarakat yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi adalah dengan terbentuknya koperasi⁴ (Suwignyo & Yuliantri, 2018).

Penerapan ekonomi kerakyatan versi Indonesia selayaknya bisa berjalan dengan baik, dikarenakan masyarakat masih memiliki modal sosial. Kekuatan modal sosial terbukti memiliki andil dalam pemulihan kondisi pasca bencana Gunung Kelud meletus di Desa Pandansari yang terletak di lereng gunung Kelud. Modal sosial berupa gotong royong, musyawarah, dan interaksi sosial (silaturahmi) dilakukan dengan pemerintah desa bersama masyarakat untuk membangun kemandirian masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan yang memanfaatkan beberapa kelompok/lembaga yang ada di masyarakat seperti Karangtaruna, PKK, ibu-ibu Fatayat NU, kelompok usaha, serta merintis jaringan kemitraan (Rozikin, 2019). modal sosial merupakan investasi untuk mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat, yakni berupa ketahanan masyarakat yang menggerakkan kebersamaan, mobilitas, saling kepercayaan dan saling mendukung untuk kemajuan bersama, khususnya pembangunan dalam semua aspeknya (Haridison, 2013). Hal ini merupakan strategi ketahanan sosial ekonomi bangsa yang ditopang oleh ketahanan budaya bangsa, dan ketahanan budaya dikuatkan oleh nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat yaitu modal sosial.

Lebih lanjut, gerakan atau kegiatan yang dilakukan akan dapat berjalan jika tingginya tingkat partisipasi semua pihak. Sebagaimana kemandirian masyarakat di

³ HOS Tjokroaminoto menyampaikan gagasan pendirian koperasi pada saat *vergadering* tanggal 26 Januari 1913. Tercatat hampir 17 koperasi beroperasi diseluruh daerah yang merupakan cabang SI (Mulawarman, 2016)

⁴Tahun 1952 tercatat berdiri Koperasi Sidomulyo di Pulau Poterran yang mempunyai tujuan memperbaiki kehidupan rakyat. Di Tulung Agung, berdiri koperasi Rukun Tani Mardi Gemi yang memiliki Usaha berupa pembelian gula, gabah dan lainnya di samping usaha memberikan pinjaman kepada petani yang membutuhkan (Suwignyo & Yuliantri, 2018)

Konstruksi untuk negeri...

Lutfillah, N.Q.

Kabupaten Gunung Kidul yang dapat tercipta karena adanya partisipasi stakeholder desa untuk meningkatkan peran serta organisasi kepemudaan, dengan cara mengelola kawasan pasca bencana alam dan mengembangkan ekowisata (Rosida, 2014:77). Adapun faktor terbesar pendorong partisipasi pemuda adalah kesesuaian organisasi dan manfaat yang diperoleh berdasarkan kemauan atau kesadaran sendiri. Faktor pendorong serta alasan pemuda untuk berpartisipasi juga terlihat potensi kepribadian dari masing-masing pemuda seperti semangat pengabdian, idealisme, inovatif dan kreatif, memiliki solidaritas yang tinggi, dan totalitas (Surdiva dkk, 2018). Dalam hal ini pemuda merupakan salah satu aktor yang mempunyai andil, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berperan dan berkontribusi dalam segala kegiatan yang dilakukan masyarakat. Selain itu, adanya kesadaran para aktornya bahwa semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara instan, semuanya butuh waktu dan proses pembelajaran.

Sejalan dengan itu, kerjasama yang harmonis semua aktor dengan mengedepankan unsur *trust* (kepercayaan) merupakan pintu masuk untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Kepercayaan baik kepercayaan (keimanan) kepada Allah SWT maupun kepercayaan antar anggota masyarakat. Dengan meningkatkan rasa kepercayaan tersebut maka stabilitas sosial ekonomi masyarakat bisa terjaga, dan tentu memberikan kontribusi terwujudnya keamanan secara menyeluruh. Akhirnya, jawaban atas ekonomi kerakyatan ala Indonesia jika digambarkan terlihat dari tulisan Mulawarman (2016)

“... Kata kunci kemandirian dan penguatan kebersamaan ekonomi untuk rakyat, hanyalah menguatkan struktur ekonomi nasional lewat pengamanan investasi dalam negeri, peningkatan kekuatan industri dan perdagangan masyarakat sendiri, menggalakkan prioritas ekspor bukan hanya bahan mentah energi atau sumber daya lain, tetapi prioritas ekspor berbasis produk genuine anak bangsa, penguatan pasar-pasar tradisional lebih penting daripada pasar modal, penguatan produk pertanian-kehutanan-perikanan untuk kepentingan petania dan nelayan, pengutan pengusaha dan produsen dalam negeri terutama kekuatan skala menengah ke bawah dan semua kebijakan lainnya. Semuanya berbasis pada price dan teknologi madya dan bukan sebaliknya. Semuanya untuk kepentingan anak bangsa dan bukan bangsa lain” (Mulawarman, 2016).

Bagaimana dengan ketergantungan? Kondisi ini dibahas oleh Mulawarman (2016) ketika HOS Tjokroaminoto membicarakan Sosialisme Islam.

“... ketergantungan bukan pada sistem sosial dan produksi, tetapi ketergantungan pada materi, dan dengan ketergantungan itu maka masyarakat akan tergeser ketergantungannya pada nilai suci Ilahiah, yaitu Allah. Begitu manusia bergeser ketergantungannya, dari Yang Satu, Tertinggi, dan menjadi pusat penyembembahan maka terjadilah



perberhalaan benda dan materi.” (Mulawarman, 2016)

Simpulan

Kekayaan sumber daya alam Indonesia mulai dari darat, laut, dan udara tidak serta merta membuat Indonesia menjadi negara Mandiri. Kegiatan impor masih dipilih sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Belum selesai dengan urusan ketidakmandirian dari segi sumber daya alam, data lain membeberkan kondisi Indonesia terhadap ketergantungan teknologi. Kondisi ini dikarenakan kuatnya cengkraman neoliberalisme, dimana telah terjadi kondisi mengharamkan intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa kepada rakyat. Untuk terbebas dari cengkraman tersebut, Indonesia harus berani untuk hijrah menerapkan paradigma ekonomi kerakyatan versi Indonesia. Belajar dari gerakan yang dilakukan HOS Tjokroaminoto untuk menjadikan Indonesia berdaya dan bermartabat, maka perlu dibentuk gerakan sosial ekonomi untuk menumbuhkan kesadaran kemandirian berekonomi dan persaingan yang tidak sehat dengan berbasis nilai Islam, sehingga model dan mekanisme yang dirancang berdasarkan pada hukum Islam. Membentuk badan usaha yaitu koperasi merupakan alternatif yang ditawarkan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, D. 2002. *Peradaban Islam*. LESFI: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Nilai Ekspor & Impor Menurut Kategori, "Value Of Export & Import By Category". *BPS.go.id*. Diakses 20 Februari 2020.
- Burhanuddin, S., Suroyo, Amd., Susilowati, E., Sulistyono, St., Supriyono, A., Widodo, SK., Najid, A., Purbani, D. 2013. *Sejarah Maritim Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. Departemen Kelautan Dan Perikanan.
- Cattleya, L. 2019. Jangan Hanya Katakan Industri Rumput Laut Potensial!. www.Kompasiana.com. Diakses 2 Januari 2020.
- Chalil, M. 1955. *Al quran dari Masa ke Masa*. Ramadhani: Semarang.
- Fauzia, M. 2019. Menko Darmin: Jika Tak Impor, Harga Jagung Tembus Rp 8.000 perkg. <https://Ekonomi.Kompas.com>. Diakses 8 Januari 2020
- Sukmana, Y. 2019. Data Panen Jagung Tak Sesuai Fakta, Menko Darmin "Sentil" Kementan. <https://Ekonomi.Kompas.com>. Diakses 8 Januari 2020
- Haridison, A. 2013. Modal Sosial Dalam Pembangunan. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*. 4:31-40.
- Kamayanti, A. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Yayasan Rumah Peneleh: Jakarta.
- Kelana. 2020. Indonesia Bisa Jadi Eksportir Garam Terbesar Dunia. *Republika.Co.Id*. Diakses 22 Februari 2020.

Konstruksi untuk negeri...

Lutfillah, N.Q.

- Kementerian Perindustrian RI. 2009. Industri Masih Gunakan 92 Persen Teknologi Impor. Kemenperin.go.id. Diakses 5 Januari 2020
- Kementerian Pertanian RI. 2016. Produksi Padi Tahun 2016 Diprediksi Tertinggi. Www.Pertanian.go.id. Diakses 4 Januari 2020.
- Mulawarman, A. D. (2016). *2024 Hijrah Untuk Negeri*. Jakarta: Rumah Peneleh.
- Mulawarman, A. D. (2016). *Jang Oetama: Jejak Dan Perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Mulawarman, AD. 2016. *Jang Oetomo: jejak dan perjuangan H.O.S Tjokroaminoto*. Galang Pustaka: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No.1 Tahun 2018. Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras.
- Pramadiba, Im. 2018. Kalla Jamin Impor Beras Tak Akan Cederai Petani. [Https://Bisnis.Tempo.co.id](https://Bisnis.Tempo.co.id). Diakses 4 Januari 2020
- Rosida, I. 2014. Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Kawasan Ekowisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat Desa (Studi Di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*. 20(2): 68-77.
- Rozikin. 2019. Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*. 25 (2): 204-225. doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jkn.44904>.
- Suradiva, AO., Muhammad., & Suryani. 2018. Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Desa Wisata Guna Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa (Studi Di Desa Wisata Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*. 24 (3): 389-402. doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jkn.38371>.
- Suwigyo, A., & Yuliantri, Rda. 2018. Praktik Kewargaan Sehari-Hari Sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat Tahun 1950-an (Sebuah Tinjauan Sejarah). *Jurnal Ketahanan Nasional*. 24 (1): 94-116. doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jkn.31239>.
- Winosa, Y. 2018. Impor Bahan Baku Dan Teknologi Masih Jadi Momok. www.wartaekonomi.co.id. Diakses 22 Februari 2020